

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, yang terdiri atas neraca tanggal 31 Desember 2019, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), dan laporan perubahan ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tanggungan Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan
Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggungan Jawab BPK
Tanggungan jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pemkot Yogyakarta untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkot Yogyakarta. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkot Yogyakarta, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini
Menurut opini BPK, LK yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkot Yogyakarta tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP. **Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan**
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 13B/LHP/XVIII.YOG/03/2020 dan Nomor 13C/LHP/XVIII.YOG/03/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 24 Maret 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta
Ketua Tanggungan Jawab Pemeriksaan,

Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., CA., CSFA, Ak.
Registri Akuntan Negara No. RNA 6833

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA					
LAPORAN REALISASI APBD					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018					
(AUDITED)					
Uraian	Reff	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	%	Realisasi 2018 Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	S.1.1.a	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,89	407.573.263.422,00
Pendapatan Retribusi Daerah	S.1.1.b	33.551.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94	33.984.531.787,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	S.1.1.c	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14	28.032.365.012,83
Lain-lain PAD yang Sah	S.1.1.d	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74	197.902.915.248,31
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	105,52	667.493.075.470,14
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Bagi Hasil Pajak	S.1.1.a.1	43.688.080.000,00	27.070.845.600,00	61,96	44.728.934.290,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	S.1.1.a.2	2.525.677.482,00	1.904.476.800,00	75,40	1.949.445.407,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	S.1.1.a.3	699.176.804.000,00	700.372.564.000,00	100,17	698.504.186.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	S.1.1.a.4	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	85,32	162.523.890.048,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		916.460.511.482,00	875.308.177.702,00	95,51	867.706.455.745,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus	S.1.1.b.1	-	65.318.639.000,00	99,51	42.500.000.000,00
Dana Penyesuaian	S.1.1.b.2	65.639.459.000,00	65.318.639.000,00	99,51	42.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		65.639.459.000,00	65.318.639.000,00	99,51	74.751.792.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	S.1.1.c.1	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	112,83	126.437.432.637,38
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	S.1.1.c.2	1.236.960.000,00	1.236.000.000,00	99,50	1.231.240.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		119.456.579.275,00	134.629.876.281,00	112,79	127.668.674.637,38
Jumlah Pendapatan Transfer		1.101.556.499.757,00	1.075.256.692.983,00	97,61	1.069.426.922.382,38
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	S.1.1.3.a	200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00	-
Dana Darurat	S.1.1.3.b	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.754.708.489.387,00	1.765.760.418.492,27	100,63	1.736.919.997.852,52
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	S.1.2.1	830.857.956.853,00	760.552.062.428,28	91,54	767.231.708.627,85
Belanja Barang dan Jasa	S.1.2.1.b	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62	496.351.994.037,57
Belanja Bunga	S.1.2.1.c	-	-	-	-
Belanja Subsidi	S.1.2.1.d	-	-	-	-
Belanja Hibah	S.1.2.1.e	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59	53.665.425.050,00
Belanja Bantuan Sosial	S.1.2.1.f	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22	7.764.735.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.546.621.869.972,00	1.404.860.023.602,17	90,83	1.325.013.862.715,42
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	S.1.2.2.a	52.092.672.025,00	25.659.058.040,00	49,08	74.967.469.865,00
Belanja Modal Perlatan dan Mesin	S.1.2.2.b	102.840.805.712,00	96.719.552.169,17	94,05	103.905.673.673,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	S.1.2.2.c	61.732.855.774,00	54.312.514.794,87	87,99	22.131.236.620,86
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	S.1.2.2.d	115.413.512.507,00	101.225.143.494,83	87,71	44.603.591.095,89
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	S.1.2.2.e	848.419.134,00	828.309.673,00	97,61	4.208.575.933,00
Belanja Modal Lainnya	S.1.2.2.f	54.159.325.245,00	48.779.803.117,30	90,07	75.276.191.867,79
Jumlah Belanja Modal		387.087.060.397,00	327.434.372.195,17	84,59	329.292.739.056,49
BELANJA TAK TERDUGA		8.227.812.190,52	317.691.064,00	3,86	293.241.254,00
Belanja Tak Terduga		8.227.812.190,52	317.691.064,00	3,86	293.241.254,00
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	S.1.2.4.1	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	S.1.2.4.1.a	-	-	-	-
Transfer bagi Hasil pendapatan Lainnya	S.1.2.4.1.b	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	S.1.2.4.2	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	S.1.2.4.2.a	1.228.210.990,00	1.228.210.990,00	100,00	1.592.338.080,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	S.1.2.4.2.b	774.593.597,00	753.036.006,00	97,22	735.662.418,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	S.1.2.4.2.c	-	-	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	S.1.2.4.2.d	-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		2.002.884.587,00	1.981.246.996,00	98,92	2.328.000.498,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.943.940.157.146,52	1.734.593.336.614,24	89,23	1.652.727.843.523,91
SURPLUS/DEFISIT		(189.171.667.759,52)	(31.167.082.630,93)	(16,48)	84.192.154.328,61
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SIPA	S.1.3.1	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	100,00	254.103.922.554,36
Penerimaan Dana Cadangan	S.1.3.1.a	-	-	-	8.044.288.550,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	S.1.3.1.b	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	S.1.3.1.c	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	S.1.3.1.d	4.343.000,00	5.725.732,00	131,84	2.550.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	S.1.3.1.e	-	-	-	-
Pinjaman Luar Negeri	S.1.3.1.f	-	-	-	-
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	S.1.3.1.g	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		226.446.667.759,52	226.448.050.491,52	100,00	262.150.761.112,36
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	S.1.3.2	-	-	-	-
Penggunaan SIPA	S.1.3.2.a	-	-	-	-
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah	S.1.3.2.b	37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00	63.861.729.721,45
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	S.1.3.2.c	-	-	-	56.038.830.960,00
Pembayaran Pinjaman Daerah	S.1.3.2.d	-	-	-	-
Pembayaran Investasi Non Permanen Lainnya	S.1.3.2.e	-	-	-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	S.1.3.2.f	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		37.275.000.000,00	37.275.000.000,00	100,00	119.900.590.681,45
PEMBIAYAAN NETTO		189.171.667.759,52	189.173.050.491,52	100,00	142.250.170.430,91
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		-	220.340.133.122,45	-	226.442.324.759,52

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA				
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH				
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018				
(AUDITED)				
NO	URAIAN	Reff	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	S.2.1.	226.442.324.759,52	254.103.922.554,36
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	S.2.2.	226.442.324.759,52	254.103.922.554,36
3	Sub Total (1-2)		-	-
4			-	-
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLPA/SIKPA)	S.2.3.	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
6	Sub Total (3+5)		220.340.133.122,45	226.442.324.759,52
7			-	-
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
9	Lain-lain		-	-
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir (6+8+9)	S.2.4.	220.340.133.122,45	226.442.324.759,52

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA				
NERACA				
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018				
(AUDITED)				
Uraian	Reff	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp	
A S E T				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	S.3.1.1			
Kas di Bendahara Pengeluaran	S.3.1.1.a	176.886.586.123,00	188.225.493.976,14	
Kas di Bendahara Dana BOS	S.3.1.1.b	34.639.092,00	324.379.804,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	S.3.1.1.c	8.176.660.137,16	6.785.532.068,16	
Kas di BLUD	S.3.1.1.d			
Kas Lainnya	S.3.1.1.e	35.993.273.260,17	31.950.758.348,22	
	S.3.1.1.g	-	87.774.031,00	
Pinjaman Pajak	S.3.1.1.i	102.125.917.028,00	97.973.824.608,00	
Penyisihan piutang pajak	S.3.1.1.i.1)	(46.638.938.595,95)	(44.976.323.154,60)	
Pinjaman pajak netto	S.3.1.1.i.2)	55.486.978.432,05	52.997.501.453,40	